

Selain itu penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengeluaran bank memiliki dampak negatif terhadap sektor efisiensi perbankan.

17. Zamil dan Rahman (2007)

Zamil dan Rahman (2007) dalam penelitiannya menghitung efisiensi perbankan syariah dan konvensional di Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan pendekatan intermediasi dengan alasan metode dan pendekatan tersebut lebih cocok digunakan untuk mengevaluasi efisiensi semua lembaga keuangan di suatu negara. Sampel yang digunakan adalah 11 bank komersil di Malaysia, yang terdiri dari 2 *Islamic Commercial Banks (ICB)* dan 9 *Conventional Commercial Bank (CCB)*, pada periode tahun 2000-2004. Dalam penelitian ini terdapat 2 tahap penelitian, yaitu Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) dalam menentukan efisiensi teknis relatif dengan asumsi Constant Returns to Scale (CRS) dan Variabel Returns to Scale (VRS). DEA digunakan untuk menghitung efisiensi relatif dari sampel bank dengan pendekatan intermediasi dari variabel input dan output yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini menunjukkan kalau perbankan syariah lebih efisien dibandingkan dengan perbankan konvensional.

18. Mediadianto (2007)

Penelitian ini menggambarkan tentang efisiensi kinerja bank syariah dan bank konvensional di Indonesia dengan menggunakan metode DEA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah lebih efisien dibandingkan dengan perbankan konvensional meskipun hanya bersifat relatif.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN DAN DATA

Bab ini memaparkan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalam bab ini akan diuraikan prosedur dan langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-korelasi. Penelitian deskriptif (descriptive research) adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran tentang suatu keadaan sejelas mungkin tanpa adanya perlakuan objek yang diteliti. Sedangkan penelitian korelasi adalah penelitian yang ingin melihat hubungan antar variabel. Dua atau lebih variabel yang diteliti guna melihat hubungan yang terjadi diantara variabel-variabel tersebut.

3.2 Data Penelitian

Data penelitian ini diperoleh dari internet dan laporan publikasi Bank Indonesia yang berupa laporan keuangan pertahun dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. Data penelitian ini terdiri atas beberapa bagian yaitu:

3.3 Sumber Data

Data bank yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 3 Bank Umum Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia. Adapun 3 Bank Umum Konvensional yaitu Bank Aceh, Bank DKI dan Bank Hagakita. Pemilihan bank konvensional yang diambil sebagai pembanding disesuaikan dengan aset yang dimiliki oleh bank syariah yang diteliti.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dari masing-masing bank yaitu berupa neraca dan laporan laba rugi. Selain itu data yang diperoleh juga berasal dari hasil riset kepustakaan, baik dari berbagai literatur terkait beserta dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

3.3.1 Periode Penelitian

Data yang digunakan diambil dari laporan keuangan pertahun yaitu berupa neraca dan laporan laba rugi masing-masing bank yaitu pada tahun 2004 hingga tahun 2006. Alasan dimulainya periode penelitian ini dari tahun 2004 karena penulis ingin memasukkan objek penelitian Bank Umum Syariah Mega Indonesia.

3.3.2 Alat Ukur Pengolahan Data

Data yang ada akan di olah dengan menggunakan alat ukur sebagai berikut:

3.3.2.1 Independent Sample T Test (Uji t)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis Model *Independent Sample T Test* (uji t). Analisis *Independent Sample T Test* (uji t) termasuk dalam kategori model analisis komparatif. Fungsinya adalah untuk menguji apakah perbedaan bilangan rerata antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya berbeda secara signifikan atau tidak.

Model *Independent Sample T Test* (uji t) mengemban dua tugas penting, yaitu melakukan uji-F (Fisher) dan melakukan uji-t (student). Uji-F merupakan uji secara keseluruhan (Overall test) yang akan menyimpulkan apakah secara keseluruhan perbedaan rerata antara dua kelompok atau lebih signifikan apa tidak. Prinsip yang digunakan sebagai dasar melakukan pengujian hipotesis dengan analisis uji-t yaitu rerata yang diuji berasal dari industri yang sejenis sehingga variansnya dapat dianggap sama atau homogenitas variansi (homogeneity variance) dan sebaran ubahan atau variabel yang dianalisis dapat mengikuti sebaran normal (normal distribution). Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis adalah:

1. Merumuskan Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: H_0 = Tingkat efisiensi perusahaan syariah sama dengan konvensional, H_1 = Tingkat efisiensi perusahaan syariah tidak sama dengan konvensional, secara statistik dapat disajikan sebagai berikut:

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

Keterangan:

μ_1 = Rata-rata indeks efisiensi Perbankan Syariah

μ_2 = Rata-rata indeks efisiensi Perbankan Konvensional

2. Menentukan tingkat signifikansi, yang dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 5%.
3. Menetapkan kriteria pengujian.

Dengan menggunakan jasa program komputer dalam analisis data maka akan diperoleh nilai probabilitas untuk menolak H_0 . Dengan demikian kriteria pengujian dapat didasarkan pada nilai tersebut, dengan kriteria sebagai berikut:

H_0 ditolak apabila:

$P < \text{tingkat signifikan (5\%)}$

H_0 diterima apabila:

$P > \text{tingkat signifikan (5\%)}$

4. Kesimpulan yang didasarkan pada hasil langkah ketiga di atas.

3.3.2.2 Indikator Rasio Keuangan

Pada umumnya konsep rasio keuangan menilai bahwa bank akan lebih efisien jika dapat menurunkan biaya operasionalnya. Selain itu pengukuran melalui rasio keuangan dapat pula dicari dengan menggunakan berbagai macam rasio sebagai berikut:

7. Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*),

$$\text{Rumusnya: CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}}$$

8. Rasio ROA (*Return on Asset*),

$$\text{Rumusnya: ROA} = \frac{\text{EBIT}}{\text{TotalAset}}$$

9. Rasio ROE (*Return on Equity*),

$$\text{Rumusnya: ROE} = \frac{\text{EAT}}{\text{TotalEquity}}$$

4. Rasio BOPO (Expenses Operations to Expenses Incomes),

$$\text{Rumusnya: BOPO} = \frac{\text{TotalBebanOperasional}}{\text{TotalPendapatan Operasional}}$$

5. Rasio LDR (Loan to Deposit Ratio) atau FDR (Financing to Deposit Ratio),

$$\text{Rumusnya: LDR atau FDR} = \frac{\text{Kredit}}{\text{DanaPihakKetiga}}$$

Menurut Bank Indonesia perlakuan LDR digunakan untuk bank konvensional sedangkan perlakuan FDR (Financing to Deposit Ratio) digunakan untuk bank syariah.

3. Rasio NPL (Non Performing Loan) atau NPF (Non Performing Financing),
 Rumusnya:
$$\frac{\text{NPL atau NPF}}{\text{Total Kredit}} = \frac{\text{Kredit Dalam Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, Dan Macet}}{\text{Total Kredit}}$$

Menurut Bank Indonesia perlakuan NPL digunakan untuk bank konvensional sedangkan perlakuan NPF (Non Performing Financing) digunakan untuk bank syariah.

7. Rasio NIM (Net Interest Margin) atau Bagi Hasil,

$$\text{Rumusnya: NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-rata Aset Produktif}}$$

Menurut Bank Indonesia perlakuan NIM digunakan untuk bank konvensional sedangkan Bagi Hasil diperlakukan untuk bank syariah.

3.4 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan model rasio keuangan. Adapun data dari masing-masing variabel berasal dari laporan keuangan bank yaitu neraca dan laporan laba rugi. Dengan demikian variabel, ukuran dan skala yang digunakan dalam pengukuran efisiensi pada industri perbankan dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 3.1 Variabel, Ukuran dan Skala yang Digunakan

Variabel	Posisi/Biaya	Ukuran/Rasio
g. Produktivitas Giro	Posisi Giro	NTB/Giro
h. Produktivitas Tabungan	Posisi Tabungan	NTB/Tabungan
i. Produktivitas Deposito	Posisi Deposito	NTB/Deposito
j. Produktivitas Tng Kerja	Biaya Tng Kerja	NTB /Tenaga kerja
k. Produktivitas Modal	Posisi Aktiva Operasi	NTB/Aktiva operasi
l. Produktivitas Tot Masukan	Total Biaya	NTB/Total Biaya

Sumber: Mediaty, 1994: "Perbandingan Efisiensi Badan Usaha Milik Negara Dan Swasta" (Studi Kasus Industri Perbankan Di Indonesia)

Keterangan tabel:

NTB (Nilai Tambah) = Pendapatan – Total Biaya (kecuali biaya tenaga kerja dan biaya bunga).

Agar dapat lebih mengetahui pengaruh dari efisiensi antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Terikat (Dependent Variable): Model rasio keuangan (CAR, FDR, NPF, ROA, ROE, BOPO, NIM).
2. Variabel Bebas (Independent Variable): Laporan keuangan yang terdiri dari neraca berupa giro, tabungan, deposito, modal, total aktiva operasi, dan Laba-Rugi berupa pendapatan secara keseluruhan, biaya tenaga kerja, total biaya dan laba bersih.

Berdasarkan keterangan variabel yang digunakan pada penelitian di atas maka penulis akan menjabarkannya menjadi lebih jelas lagi, dimana:

1. Total aktiva operasi terdiri atas kas, penempatan pada bank Indonesia, giro pada bank lain (wadi'ah untuk bank syariah), penempatan pada bank lain, tabungan, deposito, efek-efek, piutang, pembiayaan seperti mudharabah; murabahah; musyarakah; ijarah; wadi'ah; dan lain-lain, persediaan, penyertaan saham, aktiva tetap dan aktiva lain.
2. Produktivitas giro, tabungan dan deposito didapat dari nilai masing-masing di laporan keuangan neraca.
3. Modal merupakan ekuitas yang di dapat dari nilai pada laporan keuangan neraca.
4. Pendapatan secara keseluruhan ini terdiri dari: a. Pendapatan jual beli. Dimana pendapatan ini terdiri dari pendapatan marjin murabahah, pendapatan bersih salam paralel, pendapatan bersih istishna paralel. b. Pendapatan sewa-menyewa. c. Pendapatan bunga dan bagi hasil. d. Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pendapatan bonus, sertifikat bank Indonesia atau sertifikat wadiah bank Indonesia. e. Pendapatan operasional lainnya terdiri dari biaya administrasi, fee, dan komisi, fee mudharabah muqayadah (bank syariah), pendapatan devisa dan pendapatan lainnya. f. Pendapatan non operasional diperoleh dari

pendapatan sewa, laba penjualan, aktiva tetap, keuntungan selisih kurs, dan lainnya (Ilham dan Nugroho, 2006).

5. Nilai tambah yang dihasilkan perusahaan didapat dari pengurangan antara pendapatan dengan total biaya kecuali biaya tenaga kerja dan biaya bunga. Biaya dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu biaya operasional, biaya tenaga kerja dan biaya bunga. Karena pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan konsep nilai tambah, maka caranya dapat menggunakan dua metode yaitu pengukuran produktivitas parsial dan produktivitas total. Pengukuran produktivitas parsial dilakukan dengan membandingkan nilai tambah dengan setiap faktor masukan. Sedangkan pengukuran produktivitas total dilakukan dengan membandingkan nilai tambah dengan total masukan. Sehingga biaya yang diambil hanya biaya operasionalnya saja.

3.5 Teknik Pengujian

Teknik pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan uji-t (*Independent Sampel T Test*). Independent Sample T Test adalah salah satu teknik analisa inferensial yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dua sampel. Adapun prinsip yang digunakan sebagai dasar melakukan pengujian hipotesis dengan *Independent T Test* ini yaitu rerata yang diuji berasal dari populasi yang memiliki mean sama atau berbeda. Maksudnya apabila terdapat perbedaan antara dua mean tersebut, bisa saja perbedaan itu disebabkan karena faktor kebetulan, atau memang benar-benar signifikan oleh karena itulah perlu dilakukan pengujian terhadap dua mean yang berbeda itu dengan menggunakan uji t (Alhusin, hal 101, 2002).

Untuk melihat secara rinci perbedaan rata-rata di antara kelompok bank tersebut maka dilakukan uji dua rata-rata atau uji-t. Dalam hal ini uji-t digunakan untuk menguji perbedaan dua rata-rata dua kelompok bank, apakah lebih besar atau tidak. Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis adalah:

1. Merumuskan Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: H_0 = Tingkat efisiensi Perbankan Syariah sama dengan tingkat

efisiensi Perbankan Konvensional di Indonesia, H_1 = Tingkat efisiensi Perbankan Syariah tidak sama dengan tingkat efisiensi Perbankan Konvensional di Indonesia, secara statistik dapat disajikan sebagai berikut:

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

Keterangan:

μ_1 = Rata-rata indeks efisiensi Perbankan Syariah

μ_2 = Rata-rata indeks efisiensi Perbankan Konvensional

2. Menentukan tingkat signifikansi, dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 5%.
3. Menetapkan kriteria pengujian.

Dengan menggunakan jasa program komputer dalam analisis data maka akan diperoleh selain nilai F, selain itu juga dihasilkan nilai probabilitas untuk menolak H_0 . Dengan demikian kriteria pengujian dapat didasarkan pada kedua nilai tersebut, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Atas Dasar nilai F

H_0 ditolak apabila:

$$F_{hit} > F_{\alpha, k-1, k(n-1)},$$

H_0 diterima apabila:

$$F_{hit} < F_{\alpha, k-1, k(n-1)},$$

Keterangan:

$k-1$ = Derajat Bebas untuk Pembilang

$k(n-1)$ = Derajat Bebas untuk penyebut

- b. Atas Dasar Nilai Probabilitas:

H_0 ditolak apabila:

$$P < \text{tingkat signifikan (5\%)}$$

H_0 diterima apabila:

$$P > \text{tingkat signifikan (5\%)}$$

4. Kesimpulan didasarkan pada hasil langkah ke-3.

Adapun langkah selanjutnya untuk melihat beda rata-rata tingkat efisiensi dari pasangan kelompok bank, maka dilakukan uji-t dengan rumus:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{SP \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \text{ atau } S^2_p = \frac{\sum (X_1 - \bar{X}_1)^2 + \sum (X_2 - \bar{X}_2)^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)}$$

Keterangan:

X_1 = Indeks Efisiensi Perbankan Syariah

X_2 = Indeks Efisiensi Perbankan Konvensional

\bar{X}_1 = Rata-rata Indeks efisiensi Perbankan Syariah

\bar{X}_2 = Rata-rata Indeks efisiensi Perbankan Konvensional

S^2_p = Variance gabungan X_1 dan X_2

SP = Standar deviasi gabungan X_1 dan X_2

N_1 = jumlah observasi pada Perbankan Syariah

N_2 = Jumlah observasi pada Perbankan Konvensional

Karena tujuan uji-t pada penelitian ini adalah untuk melihat apakah rata-rata tingkat efisiensi Perbankan Syariah lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan Perbankan Konvensional, maka pengujian dilakukan dengan menggunakan dua ekor, sehingga kriterianya adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata tingkat efisiensi Perbankan Syariah tidak sama dengan Perbankan Konvensional, apabila:

$$t_{\text{hitung}} > t(\alpha_{0,05,n-2}) \text{ atau Prob} < \text{tingkat signifikan (5\%)}$$

2. Rata-rata tingkat efisiensi Perbankan Syariah sama dengan Perbankan Konvensional, apabila:

$$t_{\text{hitung}} > t(\alpha_{0,05,n-2}) \text{ atau Prob} > \text{tingkat signifikan (5\%).}$$

Pengujian dilakukan sesuai dengan tabel 3.1 yaitu berupa variabel, ukuran dan skala yang digunakan.

3.6 Data Perusahaan

Sebelum melanjutkan ke bab selanjutnya yaitu menganalisis data yang telah diperoleh, alangkah baiknya terlebih dahulu penulis menjabarkan sedikit tentang gambaran perusahaan-perusahaan yang dijadikan objek pada penelitian ini.

3.6.1 Bank Muamalat Indonesia

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akte pendirian Perseroan.

Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar. Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalatpun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank (IDB)* yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.

Hingga akhir tahun 2004, Bank Muamalat tetap merupakan bank syariah terkemuka di Indonesia dengan jumlah aktiva sebesar Rp 5,2 triliun, modal pemegang saham sebesar Rp 269,7 miliar serta perolehan laba bersih sebesar Rp 48,4 miliar pada tahun 2004.

3.6.2 Bank Syariah Mandiri

Kehadiran Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah dari krisis yang menerpa negeri ini. Sebagaimana diketahui krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional, telah menimbulkan dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan di Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. Bank Susila Bakti berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada

saat bersamaan, pemerintah tengah melakukan merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Salah satu akibat dari merger keempat bank ke dalam Bank Mandiri, maka Bank Susila Bakti memperoleh pemilik baru, yaitu PT. Bank Mandiri (Persero).

Dalam proses merger, Bank Mandiri sambil melakukan konsolidasi juga membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di group Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Dalam kondisi seperti itulah, Tim Pengembangan Perbankan Syariah menemukan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Setelah Tim Pengembangan Perbankan Syariah mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, maka kegiatan usaha Bank Susila Bakti berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam akta notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Kemudian Gubernur Bank Indonesia mengukuhkan perubahan kegiatan usaha Bank Susila Bakti menjadi bank umum syariah melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Senin tepatnya tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Bank ini hadir sebagai bank yang mengombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syairah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.

3.6.3 Bank Syariah Mega Indonesia

Bank Syariah Mega Indonesia didirikan sejak tanggal 14 Juli tahun 1990, Sebenarnya pada tanggal ini merupakan awal berdirinya PT. Bank Umum Tugu. Sebagaimana diketahui krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional, telah menimbulkan dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan di Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa, PT. Bank Umum Tugu juga terkena dampak krisis tersebut. Bank Umum Tugu berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger pada beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Dalam kondisi seperti itulah, Tim Pengembangan Perbankan Syariah menemukan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Umum Tugu dari bank konvensional menjadi bank syariah. Setelah Tim Pengembangan Perbankan Syariah mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, maka kegiatan usaha Bank Umum Tugu berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mega Indonesia. Bank ini mulai melakukan operasionalnya pada tanggal 23 July 2004, adapun pemegang saham pada Bank Syariah Mega Indonesia ini adalah PT. Para Global Investindo yaitu sebesar 99,99% dan PT. Para Investama sebesar 0,01%.

3.6.4 Bank Aceh

Ide Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, berawal pada saat pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Aceh tahun 1956. Pada masa tersebut, Pemerintah Daerah belum memiliki Bank tersendiri, yang dijadikan sebagai alat kelengkapan otonomi daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, meningkatkan taraf hidup rakyat serta menambah pendapatan asli daerah (PAD). Atas dasar kepentingan tersebut, pemda memandang perlu adanya lembaga keuangan milik daerah yang berperan sebagai Bank Pembangunan di daerah, disamping bank-bank pemerintah yang telah ada sebelumnya.

Ide pembentukan bank daerah tersebut, mendapatkan dukungan sepenuhnya

dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Propinsi Atjeh di Kutaradja. Hal ini ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957. Selanjutnya Pemerintah Daerah Peralihan Propinsi Atjeh, dengan Akte Wakil Notaris Mula Pangihutan Tamboenan di Kutaradja Nomor 1 tanggal 1 April 1958, mendirikan Perseroan Terbatas (Naamloze vennootschap) Bank Kesejahteraan Atjeh. Sejak tanggal 19 November 1958 bank ini telah melakukan aktivitasnya. Sehingga untuk adanya legalitas operasionalnya, maka bank ini telah mendapat izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12096/BUM/11 tertanggal 2 Februari 1960, serta pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor J.A.S/22/9 tanggal 18 Maret 1960.

Pada tahun 1962 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Bank Kesejahteraan Atjeh, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang yang dimaksud. Untuk itu Pemda menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 tahun 1963 tanggal 20 Desember 1963 tentang Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Atas dasar kekuatan Perda tersebut, Gubernur KDH Istimewa Aceh melalui Surat Keputusan Nomor 54/1973 tanggal 17 April 1973 menetapkan pelaksanaan pengalihan Bank Kesejahteraan Atjeh, Menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Secara resmi pengalihan dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 1973, yang kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberi ruang gerak yang optimal, sejalan dengan perkembangan di sektor moneter di tanah air, Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh harus melakukan beberapa perubahan atas isi Perda, khususnya di sektor permodalan, yaitu Perda Nomor 10 Tahun 1974, Perda Nomor 6 Tahun 1978. Perda Nomor 5 Tahun 1982 dan Perda Nomor 8 Tahun 1988.

Selain itu untuk memperkuat fundamental industri perbankan di tanah air, sejalan dengan tuntunan perkembangan ekonomi makro, serta untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan perbankan di dunia internasional. Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun

1998.

Dan untuk menindak lanjuti pelaksanaan Undang-undang tersebut. Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan Nomor 8 Tahun 1992 tentang penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, antara lain memberi kebebasan kepada Bank Pembangunan Daerah untuk memilih salah satu dari empat bentuk hukum, yakni, Perusahaan Perseroan, Perusahaan Daerah, Koperasi dan Perseroan Terbatas.

Melihat kepada misi dan tujuan pendirian Bank Pembangunan Daerah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang, Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh memilih bentuk hukum sebagai Perusahaan Daerah yang ditetapkan di dalam Perda Nomor 3 Tahun 1993 tanggal 5 Februari 1993.

Perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh kembali dilakukan. Diawali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 4 Februari 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah yang menetapkan bahwa bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah dapat berupa Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas. Bentuk badan hukum sebagai Perusahaan Daerah dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi perbankan saat ini, maka untuk mendukung gerak dan kinerja Bank, serta untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Perbankan di tanah air, Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh memilih bentuk badan hukum sebagai Perseroan Terbatas (PT), dengan demikian nama Bank berubah menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT. Bank BPD Aceh.

Pertimbangan lain, memilih bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas adalah, sehubungan dengan keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank, yang ditetapkan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia dan PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999. Oleh karena itu,

sebagai salah satu persyaratan keikutsertaan dalam program rekapitalisasi, maka bank diwajibkan merubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT).

3.6.5 Bank DKI

PT Bank DKI semula merupakan Bank Milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang berbentuk Perusahaan Daerah, dan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1993 tanggal 15 Januari 1993 yang merubah modal dasar dari sebesar Rp 50 Milyar menjadi sebesar Rp 300 Milyar sampai dengan tanggal 5 Mei 1999. Sejak tanggal 6 Mei 1999 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan modal dasar sebesar Rp 700 Milyar.

Perubahan bentuk dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas telah disetujui oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 tahun 1999 tanggal 1 Februari 1999 dan telah diaktakan dengan Akta Notaris Harun Kamil, SH, No. 4 tanggal 6 Mei 1999 serta telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C-8270.HT.01.01.Th.99 tanggal 7 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 45, Tambahan No. 3283 tanggal 4 Juni 1999.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris Sutjipto, SH, No. 152 tanggal 30 Januari 2006 mengenai penambahan modal dasar menjadi Rp 1.000.000.000.000 dan peningkatan modal disetor. Perubahan terakhir ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-16615 HT.01.04.TH.2006 tanggal 7 Juni 2006.

Ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan aktivitas umum perbankan, melakukan aktivitas sebagai bank devisa dan beraktivitas dalam perbankan syariah. Adapun struktur Pemegang Saham Bank DKI saat ini adalah 99,82% (Rp 552.917 juta) dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan 0,18% (Rp 1 miliar) dimiliki oleh PD Pasar Jaya.

3.6.6 Bank Hagakita

Bank Hagakita mulai beroperasi pada tanggal 9 November 1989 dan pada tanggal 12 September 1995 memperoleh status sebagai bank devisa yang memberikan peluang kepada Bank Hagakita untuk menjalankan transaksi valuta asing dan berbagai kegiatan internasional. Dengan 17 kantor yang tersebar di Surabaya (5), Jakarta (6), Jember, Malang (2), Kediri, Sidoarjo, dan Bali. Bank Hagakita dapat berkembang dengan mantap sebagai bank yang sehat dengan rasio kecukupan modal mencapai 19,73%.

Sejak awalnya, profesionalisme merupakan dasar pelayanan Bank Hagakita yang dijunjung tinggi oleh segenap manajemen. Pemisahan yang jelas antara kepemilikan dan manajemen memberikan Bank Hagakita keberhasilan yang kompetitif. Hasil yang telah dicapai terlihat dari peningkatan volume usaha yang memuaskan dan berkembangnya pendapatan sebesar 40% dari sejak awal berdirinya. Dengan visi Bank Hagakita untuk menjadi Bank bereputasi, maka Bank Hagakita berusaha untuk memberikan kemantapan pertumbuhan keuntungan yang nyata bagi kepentingan setiap pemegang saham. Per tanggal 10 Januari 2007 Bank Hagakita secara resmi menjadi anggota Rabobank Group dari Belanda. Rabobank merupakan bank berpredikat “AAA” menurut Standard & Poor's, Moody's dan Fitch. Rabobank juga diakui sebagai bank teraman ketiga di dunia oleh Global Finance dengan Modal Tier I berada pada posisi ke-15 di dunia.

3.7 Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia

Tahun 2006 merupakan tahun yang penuh dinamika bagi industri perbankan syariah. Sebagai bagian dari perekonomian nasional, dinamika ekonomi yang berkembang khususnya di sektor riil mempengaruhi perkembangan perbankan syariah. Pada awal tahun 2006 kondisi perekonomian masih sangat kuat dipengaruhi oleh dampak lanjutan kenaikan BBM yang terjadi pada akhir tahun 2005 yang tercermin dari tingginya inflasi dan suku bunga termasuk suku bunga bank umum.

Selain itu kondisi melemahnya daya beli masyarakat serta tingginya biaya produksi akibat kenaikan tersebut masih berlanjut sehingga menciptakan iklim

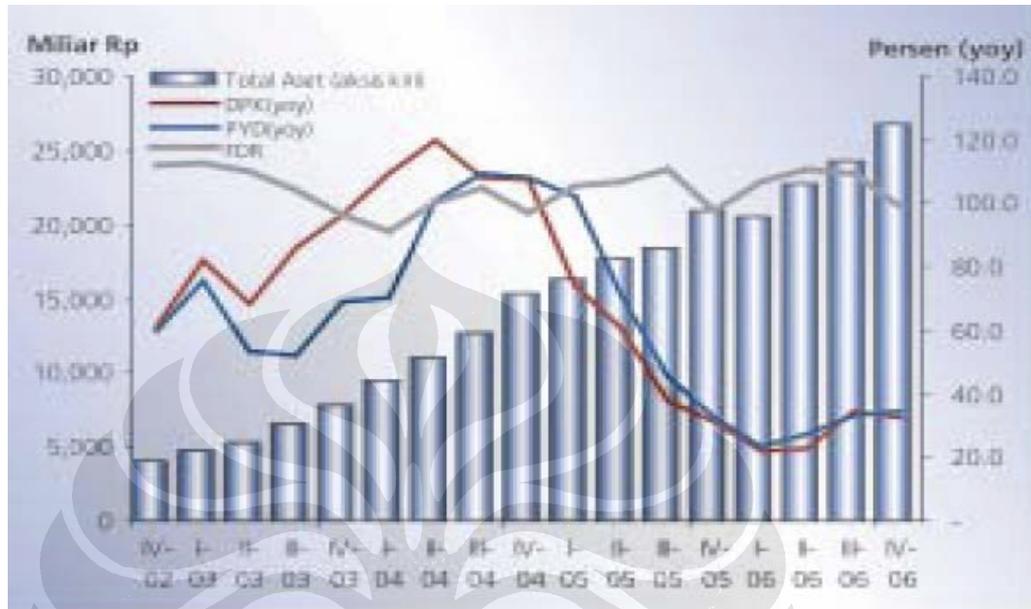
yang kurang kondusif pada dunia usaha. Namun demikian dengan konsistensi kebijakan Bank Indonesia maupun pemerintah di dalam pengendalian inflasi, secara perlahan tekanan inflasi mengalami penurunan, sehingga pada akhir tahun 2006 tercatat sebesar 6,6% atau masih berada dibawah kisaran sasaran sebesar 8+1%. Stabilitas inflasi yang kemudian diikuti dengan berkurangnya volatilitas nilai tukar memberikan ruang yang cukup bagi Bank Indonesia untuk menurunkan BI rate sebanyak 300 basis points ke mencapai single digit yaitu pada level 9,75%.

Sebagai dampaknya, sejak paro kedua ekspansi perekonomian yang lebih luas mulai terlihat meskipun belum cukup berimbang karena masih belum kondusifnya iklim investasi dan masih menggejalanya ekonomi biaya tinggi. Seiring dengan dinamika tersebut, kinerja perbankan syariah khususnya pada paro kedua tahun 2006 kembali menemukan momentumnya. Hingga akhir tahun 2006, pembiayaan yang diberikan (PYD) perbankan syariah mengalami peningkatan sebesar Rp5,2 triliun dari tahun sebelumnya sehingga mendorong kenaikan rasio Financing to Deposit (FDR) perbankan syariah dari 97,8% pada akhir 2005 menjadi 98,9%.

Dalam periode yang sama, jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun meningkat sebesar Rp5,1 triliun sehingga memberikan indikasi bahwa seluruh dana yang dihimpun dari masyarakat dapat disalurkan oleh perbankan syariah atau dengan kata lain fungsi intermediasi perbankan syariah telah berjalan optimal.

Namun demikian, kondisi belum membaiknya persepsi terhadap iklim investasi dan pemulihan kegiatan ekonomi yang berjalan lambat pada semester pertama, secara umum berdampak pada terbatasnya ekspansi penyaluran dana oleh perbankan. Kondisi ini mempengaruhi sikap pelaku investasi untuk berhati-hati dalam menempatkan dana investasi di perbankan, terlebih lagi alternatif investasi dalam bentuk portofolio placements di pasar keuangan semakin menarik dengan membaiknya stabilitas keuangan. Terbatasnya sumber dana investasi pada akhirnya menghadapkan perbankan syariah pada kondisi keterbatasan untuk melanjutkan ekspansi usaha. Hal ini tercermin dari pertumbuhan volume usaha perbankan syariah yang kehilangan momentum pada awal tahun (pertumbuhan semester pertama hanya sebesar 8,7%, sebelum akhirnya mencapai 28% di akhir tahun 2006).

Grafik 3.1
Pertumbuhan Aset, DPK, PYD dan FDR Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah



Sumber: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia tahun 2006

3.8 Perkembangan Jumlah Bank Syariah

Selama tahun 2006 jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut berasal dari penambahan sebanyak 1 (satu) Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu UUS BPD Kalimantan Timur serta 13 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) termasuk 4 BPRS konversi yaitu BPRS Lantabur, BPRS Haji Miskin, BPRS Artha Mas Abadi, BPRS Al Salaam Amal Salman, BPRS PNM-BINAMA, BPRS Jabal Tsur, BPRS Dinar Ashri, BPRS Bumi Rinjani Kepanjen, BPRS Bumi Rinjani Probolinggo, BPRS Dana Hidayatullah, BPRS Kota Bekasi, BPRS Bumi Rinjani, dan BPRS Arta Leksana. Dengan demikian pada akhir tahun 2006 industri perbankan syariah terdiri dari 3 BUS, 20 UUS dan 105 BPRS.

Sejalan dengan bertambahnya jumlah bank syariah yang beroperasi, jaringan kantor bank syariah juga mengalami peningkatan yang signifikan. Selama periode laporan, jumlah kantor bank syariah (termasuk kantor kas, kantor cabang pembantu dan Unit Pelayanan Syariah) bertambah 40 kantor dari 596 kantor pada

akhir tahun 2005 (Tabel 3.2). Ditinjau dari penyebarannya, jaringan kantor perbankan syariah kini telah menjangkau masyarakat di lebih dari 70 kabupaten/kodya di 31 propinsi. Jumlah tersebut belum termasuk jaringan kantor cabang bank konvensional penyedia layanan syariah (office channeling) sebanyak 456 kantor yang umumnya baru beroperasi pada semester kedua tahun 2006. Hal ini mengindikasikan para pemilik dana masih melihat potensi yang cukup tinggi untuk pengembangan perbankan syariah, khususnya ke wilayah-wilayah potensial di luar ibu kota propinsi.

Tabel 3.2

Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah

Kelompok Bank	2002	2003	2004	2005	2006
Bank Umum Syariah	2	2	3	3	3
Unit Usaha Syariah	6	8	15	19	20
BPRS	83	84	86	92	105
Jumlah Kantor BUS & UUS	127	299	401	504	531
Jumlah Layanan Syariah	-	-	-	-	456

Sumber: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia tahun 2006

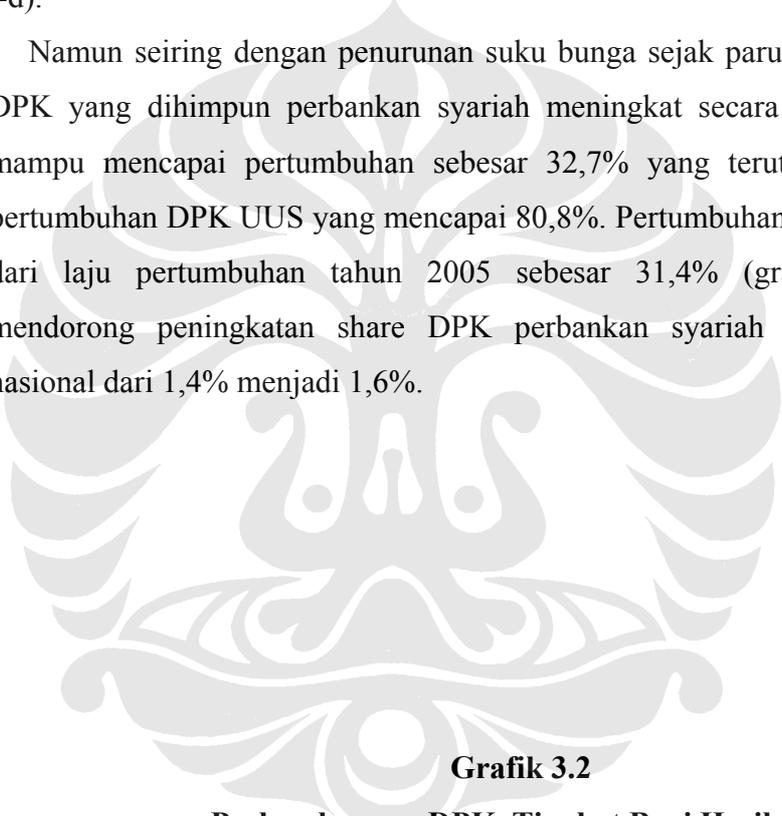
3.9 Perkembangan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah

Selama tahun 2006 industri perbankan syariah mengalami peningkatan volume usaha sebesar Rp 5,8 triliun sehingga pada akhir periode laporan mencapai Rp 26,7 triliun. Peningkatan tersebut memperbesar pangsa aset perbankan syariah terhadap total aset perbankan nasional dari 1,4% pada akhir tahun 2005 menjadi 1,6% pada akhir 2006. Pembiayaan merupakan kelompok aset perbankan syariah yang dominan. Pertumbuhan pembiayaan yang cukup signifikan dalam periode laporan memperbesar pangsa pembiayaan dari 75% pada tahun 2005 menjadi 79%, sementara kelompok aset lain khususnya dalam bentuk penempatan pada bank lain mengalami penurunan. Berdasarkan kelompok bank, meskipun bank umum syariah tetap merupakan pelaku utama industri, namun pangsa aset UUS

tercatat meningkat dari 18,2% pada 2005 menjadi 20,8% pada 2006.

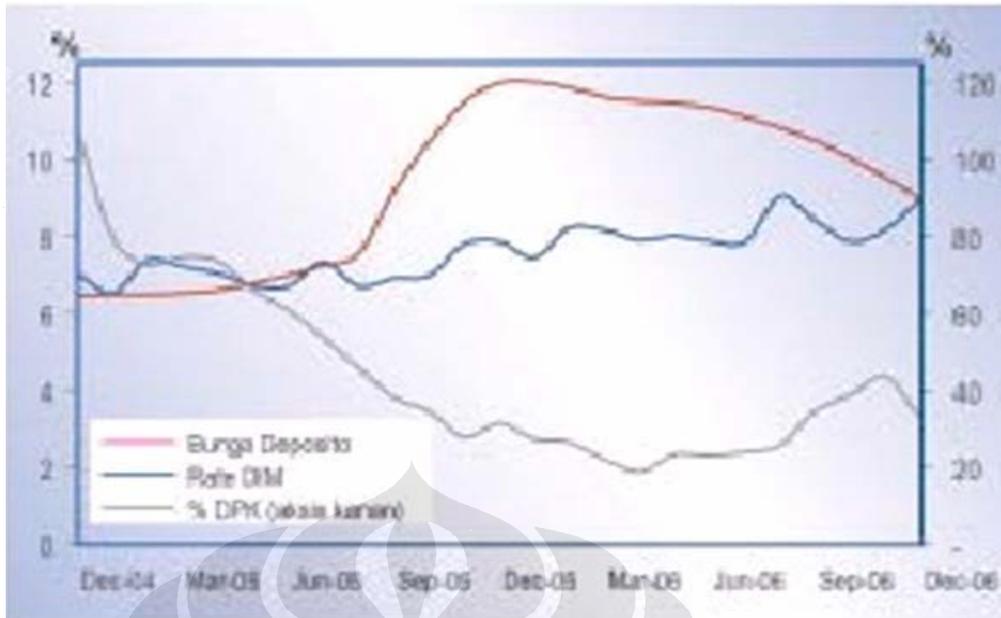
Dari sisi penghimpunan dana, perkembangan DPK perbankan syariah pada tahun 2006 diwarnai kondisi persaingan penghimpunan dana yang semakin ketat pada industri perbankan secara umum, terlebih dengan semakin menariknya alternatif investasi melalui pasar modal. Dalam kondisi suku bunga yang tinggi, daya tarik produk penghimpunan dana perbankan syariah mengalami penurunan secara relatif terhadap produk perbankan konvensional sehingga pertumbuhan DPK pada paruh pertama tahun 2006 mengalami tekanan hingga ke level 5,5% (y-t-d).

Namun seiring dengan penurunan suku bunga sejak paruh kedua tahun 2006, DPK yang dihimpun perbankan syariah meningkat secara signifikan sehingga mampu mencapai pertumbuhan sebesar 32,7% yang terutama didukung oleh pertumbuhan DPK UUS yang mencapai 80,8%. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari laju pertumbuhan tahun 2005 sebesar 31,4% (grafik 3.2), sehingga mendorong peningkatan share DPK perbankan syariah terhadap perbankan nasional dari 1,4% menjadi 1,6%.



Grafik 3.2

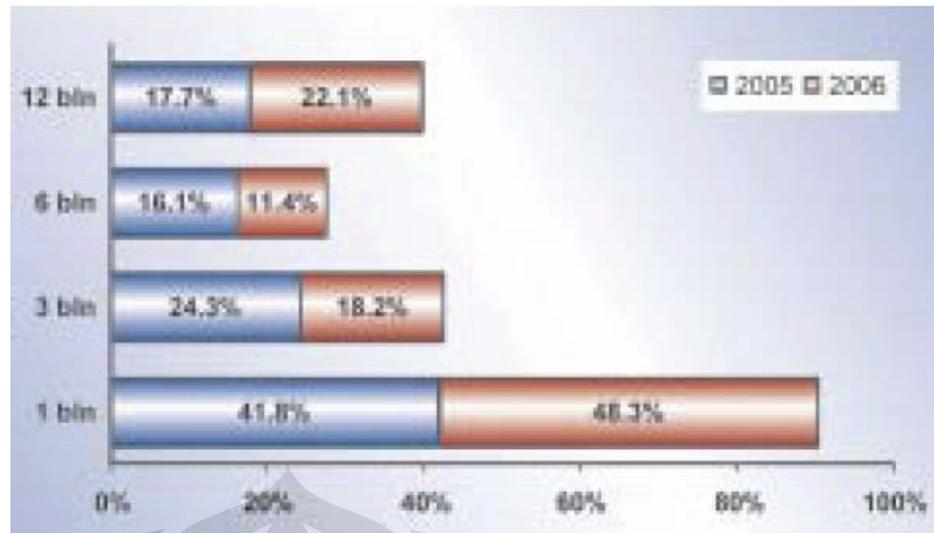
**Perkembangan DPK, Tingkat Bagi Hasil dan
Suku Bunga**



Sumber: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia tahun 2006

Struktur DPK perbankan syariah masih didominasi oleh dana investasi tidak terikat (tabel 3.3), namun menunjukkan kecenderungan bergeser ke arah giro dan tabungan (wadiah maupun mudharabah) yang memiliki maturitas relatif pendek. Hal ini mengindikasikan preferensi likuiditas nasabah perbankan syariah yang cenderung meningkat sepanjang tahun 2006.

Grafik 3.3
Perkembangan Struktur DPK



Sumber: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia tahun 2006

Kecenderungan tersebut diperkuat lagi oleh struktur jangka waktu dana investasi tidak terikat berbentuk deposito yang mengalami pergeseran ke arah tenor yang lebih pendek (terutama 1 bulan). Komposisi dana yang demikian, berpotensi meningkatkan risiko likuiditas bank khususnya yang bersumber dari fluktuasi dana kelompok deposito korporasi yang pada umumnya lebih sensitif terhadap daya saing return yang ditawarkan. Kelompok deposito ini, meskipun dari segi jumlah nasabah sangat kecil (2,3%) namun umumnya menempatkan dana dalam jumlah besar sehingga dampak pergerakannya lebih sulit diantisipasi. Kondisi ini selanjutnya berdampak pada preferensi penempatan dana bank yang cenderung berorientasi jangka waktu pendek guna meminimalisir risiko dimaksud, sehingga fungsi transformasi likuiditas khususnya untuk tujuan memenuhi kebutuhan investasi kurang optimal.

Tabel 3.3
Komposisi Dana Pihak Ketiga

Jenis Dana	Jumlah (Miliar)		Pertumbuhan (%)		Pangsa (%)	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Simpanan Wadiah						
Giro	2,045	3,416	26.2	67.0	13.1	16.5
Tabungan	60	122	35.5	105.0	0.4	0.6
Lainnya	130	210	379.3	61.6	0.8	1.0
Investasi Mudharabah						
Tabungan	4,181	6,098	31.0	45.9	26.8	29.5
Deposito	9,166	10,826	31.4	18.1	58.8	52.4
Total	15,582	20,672	31.4	32.7	100.0	100.0

Sumber: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia tahun 2006

Sementara itu pelaksanaan kegiatan penyaluran dana oleh perbankan syariah melalui berbagai bentuk akad pembiayaan masih berjalan optimal, dengan laju pertumbuhan sebesar 34,2% (yoy) atau melebihi, baik laju pertumbuhan DPK yang dihimpun sepanjang tahun 2006 maupun laju pertumbuhan pembiayaan pada tahun sebelumnya. Ekspansi pembiayaan yang tinggi terutama dilakukan oleh unit-unit usaha syariah dengan laju ekspansi 52% (yoy). Sementara ekspansi pembiayaan bank umum syariah relatif lebih rendah yaitu sebesar 29,7% (yoy) meskipun telah diupayakan secara optimal sebagaimana tercermin dari peningkatan FDR dari 90,8% pada 2005 menjadi 93,6%. Upaya perbankan syariah menyalurkan pembiayaan secara optimal ke berbagai sektor produksi di tengah kondisi perbankan nasional yang masih menghadapi kesulitan dalam meningkatkan penyaluran dana, menjadi cukup berarti dalam upaya perbaikan fungsi intermediasi perbankan. Disamping itu ekspansi yang dilakukan dapat mengangkat pangsa pembiayaan perbankan syariah dari 2,2% pada tahun 2005 menjadi 2,6% pada tahun laporan.

Berdasarkan jenis akad yang digunakan, pangsa kelompok pembiayaan berdasarkan ijarah semakin meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan yang tinggi sebesar 164,7% (tabel 9.3). Sementara berbasis bagi hasil yang terdiri atas pembiayaan mudharabah dan musyarakah mengalami penurunan dari 33% menjadi 31,5%. Demikian pula halnya pembiayaan berbasis murabahah yang

meskipun tetap mendominasi portfolio pembiayaan namun pangsa nya mengalami penurunan dari 62,3% menjadi 61,7%.

Faktor yang diperkirakan mendukung pesatnya pertumbuhan pembiayaan menggunakan akad ijarah (termasuk ijarah muntahia bittamlik) adalah fleksibilitas yang dimiliki bank untuk menetapkan besarnya sewa yang harus dibayar nasabah dari satu periode ke periode lainnya. Fleksibilitas dimaksud dinilai sangat membantu bank syariah dalam mempertahankan competitiveness dari produk-produk pembiayaan jangka panjang seperti pembiayaan pengadaan mesin produksi dan pembiayaan kepemilikan properti.

Tabel 3.4
Perkembangan Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis Pembiayaan	Jumlah (Miliar)		Pertumbuhan (%)		Pangsa (%)	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Musarakah	1,898	2,335	49.4	23.0	12.5	11.4
Mudharabah	3,124	4,062	51.5	30.0	20.5	19.9
Piutang Murabahah	9,487	12,624	24.2	33.1	62.3	61.7
Piutang Istishna	282	337	(10.0)	19.6	1.8	1.6
Qard	125	250	26.2	100.6	0.8	1.2
Ijarah	316	836	201.8	164.7	2.1	4.1
Total	15,232	20,445	32.6	34.2	100.0	100.0

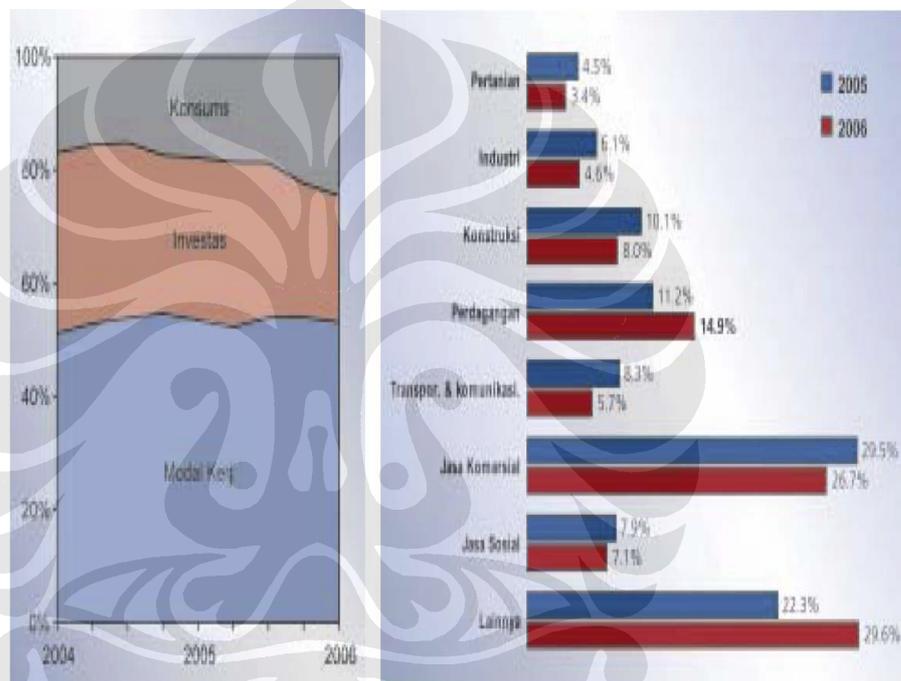
Sumber: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia tahun 2006

Kondisi belum membaiknya persepsi terhadap iklim investasi sejalan dengan perkembangan berbagai indikator produksi dan investasi yang masih menunjukkan kecenderungan melambat, menyebabkan pergeseran portfolio pembiayaan bank syariah. Di satu sisi pertumbuhan pembiayaan investasi mengalami perlambatan menjadi 2% (yoy), di sisi lain pertumbuhan pembiayaan konsumsi yang memiliki karakteristik jangka waktu pendek dan berisiko relatif rendah, mengalami peningkatan signifikan dengan laju pertumbuhan sebesar 80,3% (yoy).

Selain itu secara sektoral, dari tiga sektor utama portofolio pembiayaan bank yaitu jasa komersial, perdagangan dan konstruksi (diluar konsumsi), konsentrasi

pembiayaan pada sektor perdagangan terus mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhannya yang mencapai 77,2% (yoy), sementara konsentrasi pembiayaan pada sektor-sektor lain mengalami penurunan. Meskipun menurun, pembiayaan pada sektor jasa komersial masih merupakan pilihan utama bank dengan pangsa sebesar 26,7%, sementara pembiayaan pada sektor konstruksi memiliki pangsa 8%.

Grafik 3.4
Komposisi Pembiayaan yang Diberikan

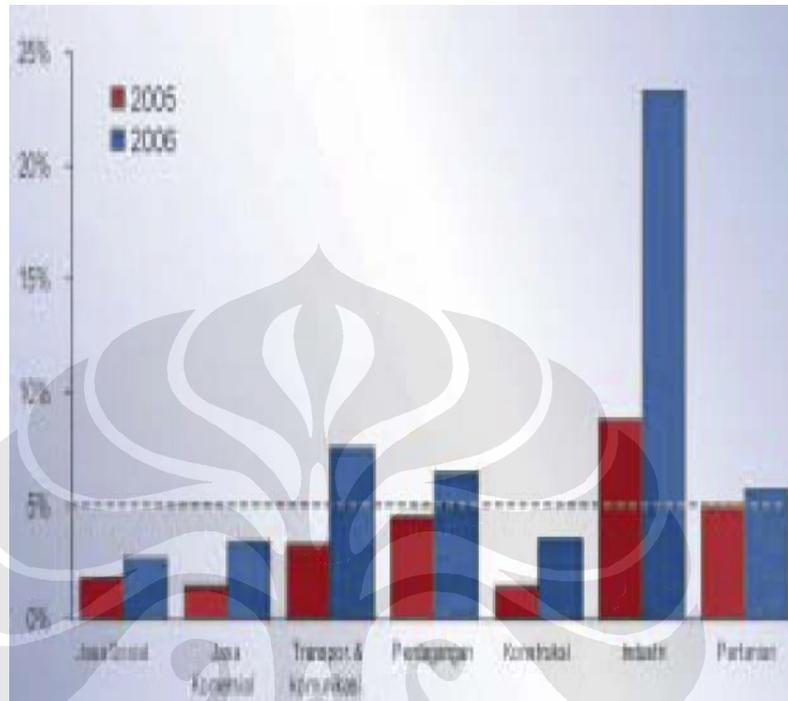


Sumber: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia tahun 2006

Salah satu aspek yang diduga melatarbelakangi realokasi pembiayaan secara sektoral tersebut adalah risiko pembiayaan pada masing-masing sektoral. Beberapa sektor yang mengalami kenaikan beban produksi cukup signifikan sebagai imbas kenaikan harga BBM seperti sektor industri dan transportasi menunjukkan peningkatan risiko. Kondisi ini tercermin dari tingginya rasio non performing financing (NPF) gross di kedua sektor tersebut yaitu 23,3% pada sektor industri dan 7,6% pada sektor transportasi (grafik 3.5). Disamping itu rasio NPF di berbagai sektor lainnya, termasuk di ketiga sektor utama mengalami

peningkatan sehingga secara umum rasio NPF perbankan syariah meningkat dari 2,8% pada tahun 2005 menjadi 4,8% pada akhir 2006.

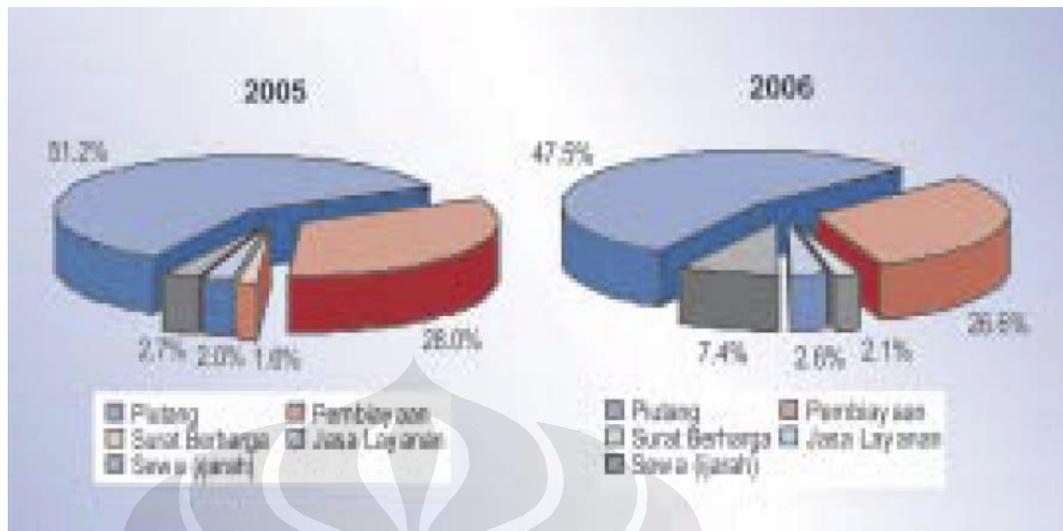
Grafik 3.5
Non Performing Financing



Sumber: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia tahun 2006

Dari segi profitabilitas, pada tahun 2005 perbankan syariah mampu mencatatkan tingkat keuntungan sebesar Rp 355 miliar, meningkat sebesar Rp116,8 miliar (49%) dari tahun sebelumnya. Ditinjau dari sumbernya, pendapatan perbankan syariah secara dominan masih berasal dari margin piutang, khususnya piutang murabahah dan bagi hasil pembiayaan bagi hasil (grafik 3.6).

Grafik 3.6
Komposisi Sumber Pendapatan



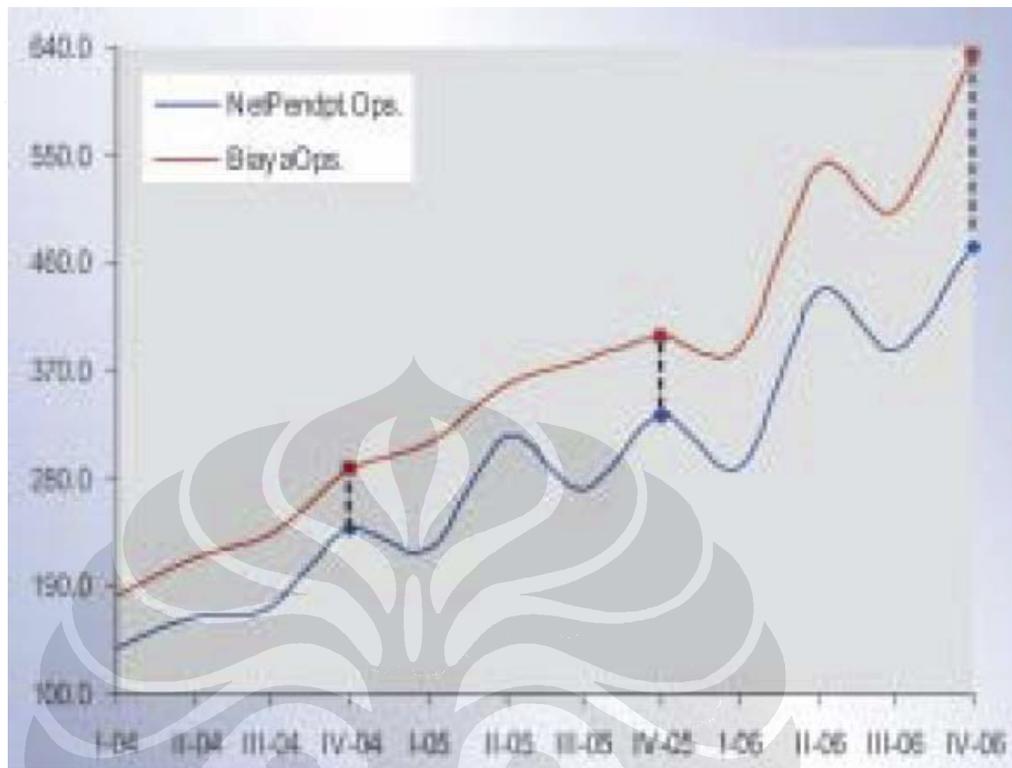
Sumber: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia tahun 2006

Namun dibandingkan tahun 2005, pangsa kedua jenis pendapatan pembiayaan tersebut mengalami penurunan sejalan dengan meningkatnya sumber pendapatan lainnya. Pendapatan bank yang berasal dari ijarah (sewa) menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan yaitu 292%. Setelah dikurangi bagi hasil kepada pemilik dana investasi yang meningkat sebesar Rp 381,1 miliar (41%), secara total pendapatan operasional bersih perbankan syariah mengalami peningkatan sebesar 42,3% (yoy). Sebagian besar pendapatan operasional bersih tersebut dipergunakan untuk menutup biaya operasional perbankan syariah yang dalam tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 39%.

Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh peningkatan biaya penyusutan dan pembentukan cadangan kerugian sebesar 52,6% sebagai langkah antisipasi bank terhadap peningkatan potensi kerugian dari pembiayaan yang disalurkan. Pertumbuhan biaya operasional yang tidak saja lebih rendah dari tahun 2006 (59,9%) namun juga lebih rendah dari pertumbuhan pendapatan operasional telah memperlebar gap antara biaya dengan pendapatan yang mencerminkan adanya peningkatan efisiensi operasional (grafik 3.7). Indikasi ini diperkuat dengan peningkatan return on asset (ROA) dari 1,4% menjadi 1,6%.

Grafik 3.7

Perkembangan Biaya dan Pendapatan Operasional



Sumber: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia tahun 2006

Pertumbuhan laba yang diikuti kebutuhan pembentukan cadangan dalam rangka mengantisipasi risiko pembiayaan yang terus memperlihatkan kecenderungan meningkat tampaknya tidak sepenuhnya dapat memperkuat kondisi permodalan bank. Disamping itu selama tahun 2006, bank syariah belum secara signifikan memanfaatkan sumber-sumber tambahan permodalan lainnya sehingga pertumbuhan modal tidak dapat mengimbangi pertumbuhan aktiva produktif. Perkembangan ini tentunya berdampak pada semakin terbatasnya kemampuan bank untuk melakukan ekspansi penyaluran dana, meskipun secara umum kondisi permodalan bank-bank umum syariah masih tergolong memadai.

3.10 Flowchart Metodologi Penelitian

